



Dapat Angin Segar Dukungan Alokasi Anggaran Pusat untuk Desa Adat Terus Mengalir

WACANA untuk memberikan penguatan kepada desa adat di Bali terus bergulir. Setelah sebelumnya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberi angin dengan mendukung agar desa adat di Bali mendapatkan alokasi anggaran melalui APBN, hal serupa juga tercetus dari Presiden RI Joko Widodo. Ini terungkap dalam *simakrama* atau tatap muka dengan tokoh agama dan adat di Bali yang berlangsung di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center, Jumat (22/3) malam.

Hal tersebut terlihat dari respons Presiden Jokowi setelah mendengarkan permintaan Bendesa Adat Desa Mundeh Kauh Nyoman Gede Arsa yang berharap masing-masing mendapat bantuan APBN karena desa adat merupakan benteng budaya Bali. "Ya... ya... saya setuju," tutur Presiden setelah mendengar permintaan Gede Arsa yang dalam kesempatan tersebut diundang menuju podium oleh Presiden Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran APBN bagi desa adat di Bali. "Kalau saya mendukung, bahkan 1.000 persen untuk itu. Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat, terutama Bali dalam menjaga kelestarian. Saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu, tinggal sekarang caranya bagaimana," jelas Sri Mulyani di hadapan bendesa adat se-Bali dalam acara bertajuk "Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali" di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (14/3) lalu.

Namun dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga me-

nyampaikan ada tata cara yang harus dipenuhi agar alokasi anggaran untuk desa adat secara regulasi hukum bisa berjalan. Dalam UU Desa sendiri disebutkan yang disebut desa dan mendapatkan alokasi anggaran dari APBN adalah desa administratif yang diakui Kementerian Dalam Negeri, yang secara historis berbeda dengan desa adat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bagaimana pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali selama berabad-abad. "Desa adat ini terbentuk dari proses sosiologis oleh masyarakat. Jadi bukan dibentuk negara, tapi oleh masyarakat adat. Jadi sangat otonom dan terpelihara dengan baik. Bali tidak punya emas, perak, batu bara, tembaga atau gas. Tapi Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik," jelas Koster.

"Bali punya faktor lain yang membedakan dengan daerah lain yakni disebut faktor *niskala* dengan membawa aura yang kuat. Itulah yang dijaga para bendesa adat ini. Sayangnya para bendesa ini banyak yang tidak mendapatkan apa-apa, murni pengabdian dibandingkan tugasnya yang luar biasa. Ini yang saya upayakan agar benar-benar berdaya di Bali," tambahnya.

Dalam kesempatan berbeda, Bendesa Adat Penida Kaja, Tembuku, Kabupaten Bangli, I Wayan Sugita, mendukung upaya pemerintah provinsi agar keberadaan desa adat di Bali eksistensinya diakui secara nasional. "Kalau saya pribadi mewaliki *krama* desa, tentunya sangat mengapresiasi jika ada bantuan alokasi anggaran bagi desa



PIDATO - Gubernur Bali Wayan Koster ketika berpidato.

adat. Apalagi bagi desa adat yang tidak punya destinasi wisata," tutur Sugita.

Sugita juga menekankan dirinya beserta *prajuru* desa lain serta segenap *krama* sebetulnya sudah cukup bersyukur dengan bantuan yang diberikan pemerintah daerah berupa bansos ataupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). "Manfaatnya amat dirasakan masyarakat. Tapi seperti yang dikatakan Pak Gubernur, *prajuru* desa punya peranan khusus untuk kehidupan sosial budaya serta adat seperti contohnya mengurus upacara kematian warga misalnya. Di mana kematian kan tidak kenal waktu, cakupannya berbeda dengan desa administratif," tukasnya.

Di tengah keterbatasan desa pakramannya, katanya, juga mampu mengelola pasraman yang memberikan pendidikan kepada anak-anak desa setempat. "Kita meminjam tempat di wantilan desa setempat dan tenaga pengajarnya diisi para penyuluh Bahasa Bali. Sepenuhnya secara sukarela alias *ngawah*."

ujar Sugita.

Ditemui terpisah, Klian Adat Desa Pakraman Sukasada Kabupaten Buleleng Ketut Sumidra juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap desa pakraman atau desa adat di Bali. Terlebih bila nantinya bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. "Sebagai *prajuru* di desa, saya sangat memperhatikan perhatian Bapak Gubernur dalam upaya penguatan desa adat di Bali, terutama dari segi ekonominya," kata Sumidra.

Ia mencontohkan seperti program *smart city* yang mengalokasikan bantuan WiFi gratis dampaknya sangat dirasakan di masyarakat, terutama untuk anak-anak muda. "Sekarang jika kita lihat di Desa Sukasada, wantilan selalu ramai dengan berbagai kegiatan, seni budaya dan sekaligus mendapatkan akses informasi yang mudah. Kalau semakin banyak titik WiFi-nya saya kira akan semakin baik untuk masyarakat kita," pungkas Sumidra. (ad804)



Ketua LPD Pacung Diadili

Denpasar (Bali Post) -

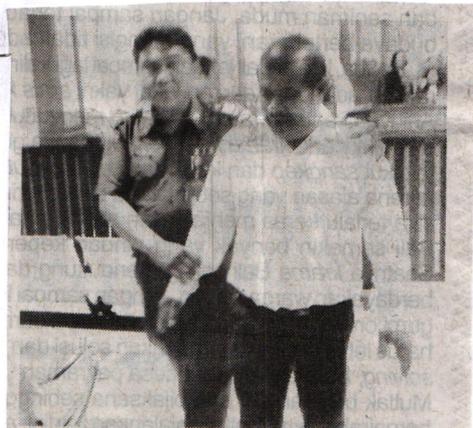
Mantan Jro Bandesa Adat Pacung yang kemudian menjadi Ketua LPD Pacung, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, terdakwa Nyoman Jaya, Selasa (26/3) kemarin mulai diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar.

JPU Putu Iskadi Kekeran di hadapan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi mengatakan, pokok dari perkara ini adalah terdakwa yang mantan bandesa adat kemudian mengambil alih dan menjabat Ketua LPD Pacung, mengeluarkan kredit tanpa agunan. Perbuatannya merugikan keuangan LPD dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Gianyar hingga Rp 142.928.523, sebagaimana laporan pemeriksaan keuangan independent.

Diuraikan dalam surat dakwaannya, terdakwa disebut mengambil alih posisi

kasir. Pada 2012 lalu, saldo kas LPD sebesar Rp 146.476.029. Namun, kenyataannya saldo kas LPD hanya Rp 3.547.500 atau terdapat selisih Rp 142.928.523 yang diduga dipergunakan oleh terdakwa Nyoman Jaya. "Terdakwa dalam memberikan kredit tanpa jaminan. Selain itu juga memberikan kredit tanpa ada didasari syarat-syarat kepada ratusan nasabah," jelasnya.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dalam dakwaan primer, dan subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999. Terdakwa juga dijerat dengan pasal 8 UU yang sama. (kmb37)



Bali Post/kmb37

SIDANG - Nyoman Jaya se usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Edisi : Rabu, 27, Mar, 2019

Hal : 5



Pemkab Klungkung Serahkan Laporan Keuangan Unaudited 2018

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, didampingi Sekda Klungkung, Gde Putu Winastra, menghadiri acara penyerahan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2018 Pemkab Klungkung. Acara ini digelar di ruang rapat Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Bali, Selasa (26/3).

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengatakan dalam menggunakan anggaran menggunakan skala prioritas, dan dengan menciptakan beberapa inovasi maka akan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. "Dengan dana terbatas Pemkab Klungkung berusaha mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Bupati Suwirta menyampaikan rasa terimakasih karena sudah berkenan memberikan masukan dan koreksi perbaikan selama proses pemeriksaan awal, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari-15 Maret 2019. Terkait dengan beberapa hal yang menjadi catatan selama proses pemeriksaan yang disampaikan oleh tim auditor BPK RI, Pemkab akan segera melakukan perbaikan. "Kami mengharapkan

agar tetap diberikan pembinaan-pembinaan dari BPK RI," ujarnya. Koordinasi dan komunikasi sudah berjalan dengan baik antara Pemkab Klungkung dengan Tim BPK RI saat melaksanakan tugas di Klungkung, khususnya pada saat pemeriksaan yang sudah dilaksanakan.

"Kami berharap bisa dilanjutkan nanti pada saat kembali ke Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan audit terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah disampaikan Pemkab Klungkung," katanya.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan rasa terimakasih karena sudah menyampaikan LKPD tepat waktu. Berdasarkan pemeriksaan awal yang sudah dilaksanakan sebelumnya, BPK berharap agar catatan yang sudah diberikan oleh tim BPK kepada Pemkab Klungkung dapat segera ditindaklanjuti. "Agar berhati-hati dalam penyusunan dan penggunaan APBD," pesan Sri Haryoso. Turut hadir dalam Acara Penyerahan tersebut Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung, I Made Seger dan Asisten Administrasi Umum I Wayan Sumarta serta undangan terakik lainnya. wan



• IST
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Klungkung Gde Putu Winastra menghadiri acara penyerahan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2018, di Kantor BPK RI Provinsi Bali, Selasa (26/3).

Edisi : Rabu, 27, Mar, 2019

Hal : 6



Dugaan Korupsi Hibah Ternak Pemkab Badung Terdakwa Buta Huruf Dituntut 3,5 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Ketua Kelompok Ternak Sapi Sari Amerta, I Made Suweca alias Gareng, 40 yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi hibah ternak Kabupaten Badung senilai Rp 127 juta dituntut hukuman 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (26/3). Meski terdakwa buta huruf, namun ia tetap minta haknya untuk menyampaikan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Luh Heny F Rahayu dan Jaksa Ni Putu Windari Suli menyatakan terdakwa Suweca dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair. Untuk itu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Suweca dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan (3,5 tahun), dikurangi selama menjalani

tahanan sementara," tegas JPU Ni Putu Windari Suli.

Selain dituntut pidana penjara, Suweca dihukum membayar denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 127.350.000. "Dengan ketentuan jika tidak membayar paling lama sebulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita. Dalam hal ini jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama setahun," tegas JPU. Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa minta diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan yang akan diajukan pekan depan.

Dalam dakwaan dibeber, terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Sapi Sari Amerta, mengajukan proposal kepada Pemkab Badung. Proposal itu untuk membeli 20 ekor sapi dan perbaikan kandang sapi dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rp 226.850.000. Dalam proposal itu, dia juga melampirkan berkas sebagai

bukti rapat dengan dihadiri sepuluh orang anggota kelompok tertanggal 30 Januari 2017.

Ternyata nama-nama tersebut fiktif. Pasalnya mereka sebagai nama yang tercantum di proposal itu tidak pernah mengetahui kalau menjadi anggota kelompok ternak sapi. Akhirnya, proposal itu disetujui dan oleh Pemkab Badung diberikan dana hibah sebesar Rp 200 juta. Namun pada pelaksanaannya yang tadinya harus membeli 20 ekor sapi, tapi hanya dibelikan 10 ekor sapi. Itupun harga pembelian sapi tak sesuai dengan yang diajukan.

Dalam pengajuannya harga seekor sapi Rp 9 juta, namun dibelikan sapi seharga Rp 8 juta ke bawah. Selain itu pembangunan kandang sapinya tak sesuai dengan rencana. Dari dana Rp 200 juta yang dihibahkan oleh Pemkab Badung, yang digunakan hanya Rp 72.650.000. Sedangkan dana sebesar Rp 127.350.000 sisanya inilah yang diduga dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi. rez

Edisi : Rabu, 27 Maret 2014

Hal : 5



RADAR BALI

Diskop Dapat Dana Pembinaan Rp 500 Juta

TABANAN - Masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pengawas koperasi. Membuat banyak koperasi bangkrut dan tidak aktif. Di Tabanan tercatat ada 570 koperasi, hanya 441 koperasi yang masih dalam kondisi aktif. Sedangkan sisa sebanyak 129 koperasi dalam kondisi tidak aktif.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tabanan I Made Yasa mengatakan masih lemah SDM koperasi sehingga perlu dilakukan pembinaan koperasi. Penting meningkatkan kualitas pengurus koperasi. Sehingga dapat bekerja dengan baik dalam pengelolaan manajemen keuangan



JULIADI/RADAR BALI

LEMAH SDM: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tabanan I Made Yasa ngebut melakukan pelatihan kepada pengurus koperasi.

koperasi.

"Kami dapat kucurkan dana sebesar Rp 500 juta dari dana DAK. Dana DAK

diperuntukkan untuk melatih dan membina SDM koperasi agar bisa terbentuk koperasi yang berkualitas dan tidak

sakit," kata Made Yasa, Selasa (26/3).

Pihaknya juga telah membuat Klinik Sehat Koperasi yang dibuka sejak Juli 2017 lalu. Dalam klinik tersebut para pengurus bisa melakukan konsultasi mengenai cara membuat pembukuan yang baik atau konseling mengenai permasalahan yang dialami koperasi.

"Kunjungan ke klinik sehat koperasi rata-rata mencapai lima koperasi dalam seminggu. Sebagian besar yang datang konsulkan adalah masalah pembuatan laporan pembukuan koperasi," ungkapnya.

Pembinaan terhadap koperasi sebenarnya rutin digelar. Sejati koperasi mereka sehat, tetapi

karena pengurusnya tidak bisa membuat laporan pembukuan akhirnya tidak gelar rapat akhir tahun (RAT) dan menjadi kesan koperasi ini bermasalah. RAT tak dapat digelar, masalah pada lemahnya SDM pengurus koperasi.

Pihaknya juga rutin melakukan pembinaan, karena ada petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL). Tetapi penyuluh ini jumlahnya terbatas. Tak sebanding dengan banyak koperasi di Tabanan.

"Di Tabanan baru ada tiga PPKL sementara kita memiliki koperasi ratusan yang menyebar di seluruh kabupaten Tabanan. jadi penyuluhan kurang optimal," pungkas Made Yasa. (uli/dit)

Edisi : Rabu, 27, Mar, 2019

Hal : 2



Diduga Tilep Dana Hibah Bantuan Sapi

● Dituntut 3,5 Tahun Penjara, Suweca Ajukan Pembelaan Lisan

DENPASAR, TRIBUN BALI - Usai berdiskusi dengan penasihat hukumnya, terdakwa I Made Suweca (40) akan mengajukan pembelaan (pledoi) lisan. Sedangkan penasihat hukumnya yakni Dody Arta Kariawan akan mengajukan pembelaan tertulis. Di persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar, pada Selasa (26/3) jaksa menuntut Suweca penjara tiga tahun dan enam bulan (3,5 tahun).

Suweca dinilai melakukan tindak pidana korupsi terkait dana hibah bantuan sapi dari Pemkab Badung tahun 2018 yang merugikan keuangan negara Rp 127 juta lebih.

"Terimakasih Yang Mulia. Menanggapi tuntutan jaksa, terdakwa akan menanggapi lisan. Saya juga akan menanggapi melalui pembelaan secara tertulis," ucap Dody Arta Kariawan kepada majelis hakim pimpinan Engeliky Handajani Day.

Namun pembelaan yang diajukan tersendiri oleh terdakwa dan penasihat hukumnya akan digelar pada sidang pekan depan. "Sidang kita tunda sampai minggu depan. Sidang minggu depan mendengarkan pembelaan lisan dari terdakwa dan tertulis dari penasihat hukumnya," ujar Hakim Ketua Engeliky.

Dalam pembacaan su-

rat tuntutan oleh Jaksa Luh Heny F Rahayu dan Jaksa Ni Putu Windari Suli, terdakwa Suweca dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair. Disebutkan, bahwa terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Suweca dengan pidana penjara selama tiga

tahun dan enam bulan (3,5 tahun), dikurangi selama menjalani tahanan sementara. Dengan perintah tetap ditahan," tegas Jaksa Ni Putu Windari Suli.

Selain dituntut pidana badan, Suweca dihukum membayar denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Pula, ia diwajibkan membayar uang pengganti Rp 127.350.000. Dengan ketentuan jika tidak membayar paling lama sebulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita. Dalam hal ini jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama setahun. (can)

Edisi : Rabu, 27, Mar, 2019

Hal : 6



Bupati Ungkap Penyimpangan Proyek Sentra IKM

Gianyar (Bali Post) -

Bupati Gianyar I Made Mahayastra akhirnya mengungkap hasil penelusuran sementara, terkait kronologi penyimpangan proyek sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Rabu (27/3) kemarin. Ia menemukan ada perintah ilegal tanpa sepengetahuan pemerintah, sehingga proyek ini dilanjutkan setelah batas waktu pengerjaan.

Mahayastra menerangkan, pihaknya sudah mengkaji proyek ini dari awal mengerahkan tim audit dengan diawasi oleh Inspektorat. "Dari awal pelaksanaan diawasi penuh oleh Inspektorat dan staf yang ada di sana. Pada saat pengecekan fisik, sampai ke sana dikawal oleh Bapak Juanda (Kepala Inspektorat - red), siapa konsultannya, barangnya apa. Sehingga pada batas akhir pengerjaan yang semestinya sudah selesai, namun hanya menyelesaikan pengerjaan 77 persen," ungkapnya didampingi Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya di Kantor Bupati Gianyar, Rabu (27/3) kemarin.

Menurut Mahayastra, di sinilah mulai muncul permasalahan, yakni para buruh yang melanjutkan bekerja setelah batas akhir waktu pengerjaan pada Desember 2018. Dari pengerjaan bangunan yang selesai 77 persen menjadi rampung 88 persen, sehingga ada penambahan pengerjaan 11 persen setelah batas waktu pengerjaan.

Menurut Mahayastra,

ada yang memberi perintah lisan, sehingga sejumlah pekerja proyek melanjutkan pengerjaan lagi 11 persen tersebut. Akhirnya sejumlah pekerja proyek datang ke Kantor Bupati Gianyar pada Februari 2019 menuntut pembayaran untuk pengerjaan lagi 11 persen itu. "Kenapa tukangnya bisa bekerja setelah itu (batas waktu - red)? Itu yang kami selidiki. Sehingga begitu datang mereka awal Februari lalu, saya rekam. Ini rekamannya. Saya yang nyuruh bongkar saja (pengerjaan 11 persen - red). Karena tidak mungkin uang akan kembali, siapa yang mau bertanggung jawab karena ini (melanjutkan pengerjaan 11 persen - red). Perintahnya ilegal," tegas Mahayastra seraya menunjukkan rekaman pertemuan dengan pihak rekanan.

Mahayastra mengatakan alasan kuat menyuruh membongkar pembangunan 11 persen tersebut karena memang itu nilainya cukup besar. "Siapa yang menjamin pengembalian uang dia (pekerja proyek - red), karena memang tidak mungkin

uang dia akan kembali. Jalan satu-satunya seberapa uang sisa untuk memperkecil kerugiannya, ya memang harus dibongkar," katanya.

Mendapati penyimpangan ini, Mahayastra sempat menyarankan kepada pekerja proyek tersebut untuk melapor ke kejaksaan dan kepolisian, jika memang ditemukan ada unsur melawan hukum. "Saya suruh melaporkan ke kejaksaan atau kepolisian, siapa tahu ada unsur melawan hukum. Saya juga akan menindak kalau ada anak buah saya yang melanggar. Tapi ini sekarang masih dalam proses," tegasnya.

Lantas akan diapakan gedung IKM di Desa Celuk yang belum rampung itu? Mahayastra mengaku akan melanjutkan pengerjaan pada 2020. Tentunya kelanjutan pengerjaan ini akan ditander kembali. "Kami kerjakan 2020 sesuai ketentuan berlaku, berapa persen kemarin setelah diserahkan kepada pemerintah," katanya.

Mengantisipasi terulangnya persoalan serupa, Mahayastra mengaku akan lebih tegas. Ia juga akan

mencari kepala OPD yang lebih cekatan. "Mudah-mudahan ke depan ini tidak terulang," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pekerja melakukan pembongkaran paksa pengadaan bangunan fisik sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Senin (25/3) lalu. Pembongkaran terhadap proyek Pemkab Gianyar di bawah OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gianyar itu dilakukan dengan penurunan belasan ribu genteng.

Informasi yang dihimpun di lapangan, pembongkaran ini dilakukan lantaran pihak pelaksana proyek dengan nomor kontrak 511.2/2268/DISPERINDAG yakni PT Marabuntha Ciptalaksana (MC) ini lepas tanggung jawab. PT MC diketahui sampai saat ini tidak membayar subkontraktor-subkontraktor yang telah merampungkan bangunan fisik dengan nilai pekerjaan Rp 4.173.966.000 itu. Pekerja pun menuntut kejelasan dari Disperindag selaku *leading sector* terkait pembayaran proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018. Para pekerja mengaku kerugian dari pengerjaan proyek ini mencapai Rp 3 miliar lebih. (kmb35)

Edisi : Kamis, 28, Mar, 2019

Hal : 9



Kasus OTT di Tirta Empul Kerugian Daerah Rp 11 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo sempat menyebut oknum bendesa sebagai calon tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Pura Tirta Empul, Kecamatan Tampaksiring. Namun kini penanganan kasus ini oleh aparat kepolisian justru gamang. Padahal sesuai penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kerugian sebesar Rp 11 miliar dari pemungutan tiket masuk di objek wisata mata air itu.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, kasus di Objek Wisata Pura Tirta Empul sudah mau selesai. Sebab hasil audit BPK berdasarkan bukti yang ada sudah keluar beberapa waktu lalu. "Ada

kerugian daerah sebesar Rp 11 miliar," kata Mahayastra, Rabu (27/3) kemarin.

Setelah hasil audit itu keluar, kata Mahayastra, akan ada tindak lanjut berupa pengembalian. Berapa jumlah yang akan dikembalikan, ia mengaku masih akan merapatkan hal tersebut. "Itulah yang tinggal kita bahas nanti, kalau tanda tangan kerja sama per 2018 dipakai pedoman, dia cukup mengembalikan Rp 2,5 miliar, kalau (kerja sama-red) per 2013 dia mengembalikan Rp 11 miliar," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Gianyar Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, kasus ini memang dilanjutkan dengan pengembalian kas daerah sesuai penghitungan Inspektorat.

Sementara kerja sama Objek Wisata Tirta Empul dengan Pemkab Gianyar terus berlanjut hingga lima tahun ke depan. Disinggung terkait oknum yang sempat disebut sebagai calon tersangka dalam kasus ini, AKBP Priyanto mengakui memang sempat menyebut oknum sebagai calon tersangka. Namun kini ia menegaskan tidak ada tersangka dalam kasus ini. "Tersangka tidak ada, calon bukan tersangka. Semua saksi," tegasnya.

Priyanto Priyo Hutomo menambahkan, apabila sudah dilimpahkan ke Inspektorat, maka kasus ini sudah tidak dilanjutkan lagi. "Kalau dilimpahkan ke Inspektorat, ya sudah selesai. Tinggal pengembalian ke kas daerah," ujarnya. (kmb35)

Edisi : Kamis, 28, Mar, 2019

Hal : 9



Audit Kasus OTT Tirta Empul Rampung

★ Bendesa Manukaya Let Hanya Sebatas Saksi

GIANYAR, NusaBali

Kasus OTT Tirta Empul memasuki babak baru. Hasil penghitungan kerugian negara oleh inspektorat akhirnya rampung. Sementara Bendesa Manukaya Let, I Made Mawi Arnata, 67, yang sebelumnya ditarget sebagai calon tersangka, akhirnya hanya ditetapkan sebagai saksi alias batal tersangka. Perhitungan terhadap kerugian negara kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tirta Empul itu kini sudah diserahkan pada Polres Gianyar yang menangani kasus OTT pada Selasa, 6 November 2018 lalu.

Hal ini diungkapkan Bupati Gianyar, Made Mahayastira, Rabu (27/3). Bupati Mahayastira menyatakan Inspektorat sudah melakukan audit berdasarkan bukti yang ada. Kata dia, ada dua pedoman perhitungan kerugian daerah, yakni perhitungan kerugian sejak 2013 sebesar Rp 11 miliar. Dan opsi kedua perhitungan sejak 2018 lalu sebesar Rp 2,5 miliar.

“Sekarang apakah itu dikembalikan utuh Rp 11 miliar atau dikembalikan selama ada kerja sama resmi bersama Pemkab Gianyar dengan Tirta Empul selama 2018 sebesar Rp 2,5 miliar,” ujarnya. Sebagai langkah akhir, pihaknya akan melangsungkan kembali berembuk membahas masalah pengembalian kerugian daerah itu.

“Sekarang tindak lanjut kami rapat,” jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo, menyatakan pihak Desa Pakraman Manukaya Let, selaku pengelola tiket Pura Tirta Empul dari pukul 15.00 WITA-18.00 WITA, harus mengembalikan kerugian negara ke kas daerah. “Bayar ke kas daerah yang ditentukan besarnya oleh Inspektorat. Dan kerja sama (Pemkab-Manukaya Let tentang pengelolaan tiket, red) dilanjutkan sampai 5 tahun ke depan,” ujar AKBP Priyanto.

Kata Priyanto, dengan dikembalikannya dana sesuai kepu-

tusan pemerintah, maka kasus OTT Tirta Empul telah selesai. “Kalau dilimpahkan ke Inspektorat ya sudah selesai, tinggal pengembalian ke kas daerah,” ujarnya. Mengenai calon tersangka seperti saat press rilis pada November 2018 lalu, Kapolres menyatakan itu hanya calon tersangka.

“Calon bukan tersangka, semuanya saksi,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, kasus OTT berlangsung November 2018 lalu di tempat pemungutan tiket di Pura Tirta Empul, Desa Pakraman Manukaya Let, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar. Saat kejadian, ada dua petugas tiket yang diamankan beserta barang bukti tiket. Tiket yang diamankan itu berlogo Desa Pakraman Manukaya Let. Tiket berlogo desa itu disebar-kan mulai pukul 15.00-18.00. Sedangkan tiket resmi berlogo Pemkab disebar-kan mulai pagi hingga pukul 15.00. Sesuai Perda, tiket berlogo desa tidak sesuai ketentuan Perda. nvi

Edisi : Kamis, 28, Mar, 2019

Hal : 1



Bansos Macet, Anggota Dewan Teriak

★ Bawaslu Bali: Boleh Cair, Asalkan Tak Dipolitisasi



Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Ketut Rudia.

DENPASAR, NusaBali

Pencairan bansos/hibah untuk masyarakat yang difasilitasi DPRD Bali melalui APBD Induk 2019, tersendat karena pesta gonggong demokrasi Pileg/Pilpres 2019. Sebagian anggota DPRD Bali mengeluhkan bansos tidak cair, padahal Ranperda APBD Induk 2019 sudah ditetapkan jadi Perda dan mendapatkan registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara, Bawaslu Bali menyatakan bansos boleh cair, sepanjang tidak dipolitisasi.

Anggota DPRD Bali yang teriak atas tersendatnya pencairan bansos dalam momen Pemilu 2019, antara lain, Nyoman Tirtawan. Anggota Fraksi Panca

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Bansos Macet, Anggota Dewan Teriak

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng ini menvavangkan bansos dikait-kaitkan dengan Pemilu. Seharusnya, bansos sudah cair Februari 2019 lalu, namun faktanya sampai sekarang tidak ada pencairan.

"Bansos dari APBD Induk 2019 seharusnya sudah bisa cair bulan Februari. Tapi, eksekutif menyampaikan bansos baru akan cair, Juni 2019 depan. Ya, sudah pasti terlambat-lah pembangunan fisik di masyarakat," sesal Tirtawan kepada NusaBali, Rabu (27/3).

Tirtawan mengatakan, kalau bansos baru dicairkan Juni 2019 mendatang, pembangunan fisik bisa terkendala, karena menyangkut aturan hukumnya. "Nggak mungkin rakyat membangun wantilan dalam waktu 5 bulan, membangun jembatan dalam waktu 5 bulan. Bisa kena penalti dan lewat tahun anggaran itu. Bisa menjadi masalah hukum itu," tandas politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Tirtawan pun berharap Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali bisa memberikan solusi. Menurut

Tirtawan, bansos itu tidak ada kaitan dengan Pemilu. Mau diguyur atau dicairkan, semuanya sudah diverifikasi.

"Sebab, bansos itu dirancang bukan karena Pemilu, tapi atas kebutuhan masyarakat Perda APBD Bali Induk 2019 sudah diregistrasi di Kemendagri, kenapa bantuan sosial untuk masyarakat harus ditunda? Bansos nggak ada kaitan dengan Pemilu, itu sudah lolos verifikasi kok," jelas politisi yang pernah 'ngamuk' di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali gara-gara proses bansos yang difasilitasinya terlambat dikerjakan ini.

Bukan cuma itu, Tirtawan juga memasalahkan bansos yang dipangkas dari rancangan Rp 6 miliar menjadi Rp 4 miliar per anggota Dewan. Padahal, APBD Bali mencukupi untuk memberikan bansos kepada masyarakat. Tapi, kata dia, bansos dirasionalisasi karena alasan membangun shorcut.

"Sekarang sudah ada perhelatan Pilgub Bali yang menelan biaya Rp 200 miliar. Membangun rumah sakit dengan anggaran Rp 200 miliar juga sudah nggak ada lagi. Kalau dulu, ada Pilgub

Bali, ada membangun rumah sakit, boleh kita maklumi. Tapi, sekarang dana itu ada, kenapa malah dilakukan pemangkasan?" katanya.

Sayangnya, Pimpinan DPD Bali belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersendatnya pencairan bansos yang dimasalahkan anggota Dewan ini. Saat dihubungi NusaBali per telepon, Rabu kemarin, ponsel Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP) bernada mailbox.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (dari Fraksi Golkar) dan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa (dari Fraksi Gerindra), tidak menjawab telepon. Sementara dari eksekutif, Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Gede Darmawa, juga tidak menjawab telepon.

Sementara itu, Bawaslu Bali menyatakan pencairan dana bansos yang difasilitasi anggota Dewan tak ada masalah, sepanjang tidak dipolitisasi. Menurut Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, bansos mau dicairkan saat musim Pemilu atau diguyur

setelah Pemilu, tidak masalah. "Yang penting, jangan dipolitisir, karena akan bermasalah hukum," ujar Ketut Rudia saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.

Rudia mencontohkan, ketika anggota DPRD Bali yang berstatus incumbent turun ke masyarakat membagikan bansos, disertai ajakan memilih yang bersangkutan, di mana ada atribut kampanye atau partai politik, maka itu sudah dikategorikan melanggar dan bisa dipidana "Peserta Pemilu harus berhati-hati di situ," tandas mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini.

Menurut Rudia, Bawaslu Bali tidak punya kewenangan melarang atau mencegah pencairan dana bansos yang difasilitasi anggota Dewan. Sebab, hal itu sepenuhnya kewenangan eksekutif (Pemprov Bali). MoU antara eksekutif dan Bawaslu pun tak ada menyangkut soal waktu pencairan bansos di tengah musim Pemilu. "Yang dilakukan Bawaslu Bali adalah mencegah penyalahgunaan dana bansos tersebut. Kalau soal waktu pencairan, silakan mau kapan saja, tidak masalah," jelas Rudia. **nat**

Edisi : Kamis, 20 Maret 2014

Hal : 1 & 15



Ketua LPD Bebetin Dituntut 3 Tahun

★ Kasus Korupsi Dana LPD Rp 2,4 miliar

Terkait kerugian negara yang mencapai Rp 2,4 miliar, sudah akan dikembalikan sehingga terdakwa tidak perlu mendapatkan pidana tambahan.

DENPASAR, NusaBali

Ketua LPD Desa Adat Bebetin, Sawan, Buleleng, I Cening Wartana, 55, hanya bisa tertun-

duk lesu usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buleleng membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (27/3). Wartana dituntut hukuman 3 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsidi 6 bulan kurungan.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ni Made Sukerani, JPU Putu Agus Eka Sabana Putra dan Putu Andy Sutadharma menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin Rp 2,4 miliar.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 64

KUHP.

Dalam pertimbangan memberatkan, JPU menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi. "Pertimbangan meringankan, terdakwa menyesal dan sudah mengembalikan kerugian negara," tegas JPU yang langsung membacakan tuntutan 3 tahun penjara kepada terdakwa.

Terkait kerugian negara yang mencapai Rp 2,4 miliar, sudah akan dikembalikan sehingga terdakwa tidak perlu mendapatkan pidana tambahan. Atas tuntutan ini, terdakwa yang didampingi kuasa

hukumnya, meminta waktu satu minggu untuk menyiapkan pembelaan (pledoi). "Sidang akan kami lanjutkan pekan depan agenda pledoi dari terdakwa," pungkask hakim Sukerani yang menutup sidang.

Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Ketua LPD Desa Bebetin dibantu Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga meskipun tanpa dilengkapi jaminan kredit. Selain itu, ada juga beberapa kredit fiktif yang menggunakan KTP orang lain. "Terdakwa Cening mengetahui bahwa kredit yang diajukan saksi menggunakan identitas orang lain. Tidak hanya itu, saksi

juga mengajukan kredit tidak sesuai prosedur. Salah satunya tidak dilengkapi jaminan kredit dan plafon pinjaman," beber JPU.

Meski begitu, terdakwa tetap memerintahkan saksi Ni Luh Swari (kasir LPD) untuk mencairkan dana tersebut. Setiap pencairan terdakwa mendapatkan fee dari pemilik kredit. Karena mudah mendapatkan uang, Cening pun semakin ketagihan. Total kredit yang dicairkan Rp 2,9 miliar. Dari 31 kredit yang diajukan, terdapat 27 berkas kredit yang menjaminkan satu buah buku sertifikat hak milik atas nama Wayan Sulingga dengan luas tanah 2.600 meter persegi.  rez



TERDAKWA | Cening Wartana saat berbincang dengan JPU usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, (28/3).

Edisi : Kamis 28 Maret 2019

Hal : 5



Rapat Paripurna DPRD Badung

Bupati Giri Prasta Sampaikan LKPJ 2018

RAPAT Paripurna DPRD Badung, masa persidangan pertama Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2018 dilaksanakan, Kamis (28/3) kemarin, di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD, Puspem Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata.

Dalam penjelasannya, Bupati Giri Prasta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama sehingga LKPJ ini dapat disampaikan tepat waktu. Penyampaian LKPJ dalam rangka memenuhi ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) yaitu Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara tepat dan akurat.

Lebih lanjut dikatakan, LKPJ sekaligus merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai implementasi dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang



LKPJ - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan LKPJ tahun 2018 kepada Ketua DPRD Putu Parwata pada rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Kamis (28/3) kemarin.

dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Dalam dokumen RKPD tersebut pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2018 adalah "Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan serta optimalisasi pengelolaan potensi daerah mewujudkan kemandirian masyarakat."

Di dalamnya terdapat sembilan prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan Iptek, kesehatan, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sarana

prasarana wilayah, perumahan dan pemukiman, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, penataan ruang dan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian dan kebudayaan serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sementara mengenai pengelolaan keuangan daerah dijelaskan, target pendapatan daerah pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 7,5 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp 5,4 triliun lebih atau 71,60 persen. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 8,1 triliun lebih, terealisasi Rp 5,7 triliun lebih atau 71,11 persen. Penerimaan pembiayaan di-

rancang Rp 585 miliar lebih, realisasi Rp 600 miliar lebih atau 102,66 persen. Sedangkan dari penarikan kembali pokok dana bergulir sebesar Rp 31,6 juta. Dari pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp 221 miliar lebih.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi pemerintah sudah tepat waktu menyampaikan LKPJ 2018 kepada Dewan. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki serta perlu penyesuaian terhadap program-program yang harus ditekankan. Dicontohkan, mengenai tata kelola pemerintahan khususnya keuangan daerah akan dilakukan peningkatan ke depan agar lebih pasti dari asumsi-asumsi yang digunakan dalam hal pendapatan daerah.

Sementara dalam pelayanan masyarakat sudah sangat dirasakan, termasuk terwujudnya kerukunan antarumat beragama yang memberikan kontribusi positif terhadap pariwisata di Badung. Pendidikan dan kesehatan juga sudah dirasakan masyarakat termasuk santunan penunggu pasien. "Yang substansi kita akan evaluasi, kita beri catatan-catatan demi pelayanan maksimal kepada masyarakat," tambahnya. (ad892)

Edisi : Jumat, 29, Mar, 2019

Hal : 3



Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Hibah Rp 1,15 Miliar di Karangasem



SERAHKAN BANTUAN - Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan dana hibah di jaba Pura Taman Gangsing Kabupaten Karangasem, Kamis (28/3) kemarin.

WUJUD nyata program "Badung Angelus Buana", Badung berbagi dari Badung untuk Bali yang merupakan gagasan serta komitmen yang dipegang teguh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam membantu meringankan kebutuhan pribadi serta komunal masyarakat di Pulau Dewata. Kamis (28/3) kemarin bertempat di *jaba* Pura Taman Gangsing, Karangasem. Bupati Giri Prasta untuk kali kedua menyerahkan bantuan dana hibah di Kabupaten Karangasem, setelah sebelumnya mengunjungi dan memberikan bantuan hibah untuk *Karya Melaspas* Pura Dalem di Desa Pakraman Umacetra Kecamatan Selat.

Untuk kali ini bantuan dengan total nilai Rp 1,15 miliar diserahkan simbolis oleh Bupati Giri Prasta kepada masyarakat di tiga Desa Adat di Kecamatan Sidemen. Turut mendampingi pada kesempatan tersebut, tokoh

masyarakat IGN Kesuma Kelakan dan Kabag Humas Setda Badung Putu Thomas Yuniartha. Bantuan dana hibah ini di antaranya untuk membantu *Karya Mamungkah* di Pura Dalem Lingsir Banjar Toh Jiwa Kelod sebesar Rp 300 juta, bantuan satu set gong kebyar Pura Dalem Desa Adat Kubung Kecamatan Sidemen sebesar Rp 350 juta dan pembangunan Bale Agung Desa Pakraman Wangsean Desa Wiswa Kerta Sidemen sebesar Rp 500 juta.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banjar Kebung sudah diberikan kesempatan untuk hadir bersama dengan masyarakat di Pura Taman Gangsing dalam upacara *piodalan*. Bupati Giri Prasta mengatakan sangat memahaminya bagaimana waktu banyak dihabiskan masyarakat untuk adat, uang habis untuk kegiatan *yadnya* itu sendiri.

Untuk itu Bupati hadir untuk meringankan beban masyarakat salah satu contoh untuk membangun pura begitu juga bale banjar, wantilan termasuk membantu yang lainnya.

Khusus Kabupaten Karangasem dana hibah BKK Badung pertama yang dituju yaitu Munti Gunung. Bupati Badung mengikuti program Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran begitu pula dari Badung membangun Bali dari pinggiran. Untuk Munti Gunung akan menerima bantuan bedah rumah sebanyak 215 KK dari 400 bedah rumah BKK Kabupaten Badung untuk Kabupaten Karangasem dan masing-masing mendapat dana Rp 50 juta tanpa potongan pajak dengan bentuk bangunan rumah sehat dan layak huni yang dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar bebas, kamar mandi dan dapur. "Kami harapkan rumah ini dibangun dengan gotong royong," kata Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, *Manggala Karya* Jro Mangku Wika mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama rombongan yang memberikan bantuan hibah yang bertempat di *jaba* Pura Taman Gangsing. Pura Taman Gangsing ini dulunya adalah tempat Yoga Cokorda Pema-yun *saking* Sidemen dan pura ini ditinggalkan dan diberikan kepada Desa Adat Kebung.

"Masyarakat kami sangat antusias mendukung program berbagi dari Badung untuk Bali dari Bapak Bupati Badung walaupun beliau bukan pemimpin di Karangasem," ungkapnya. (ad901)



Tak Merata, Dana Kebencanaan Desa

Masih ada desa yang belum mengalokasikan dana kebencanaan karena Permendagri terbit setelah desa-desa menyusun rencana kerja pemerintahan (RKP) Desa.

SINGARAJA, NusaBali

Desa-desa di Buleleng belum merata mengalokasikan dana kebencanaan, pada APBDes tahun 2019. Padahal, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengisyaratkan agar desa-desa mengalokasikan dana kebencanaan, pada pos bidang 5 (lima). Apalagi sudah ada perubahan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dari versi Siskeudes 1.0, ke versi 2.0.

Hal itu terungkap dalam Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, Kamis (28/3) di Gedung Mr I Gusti Ketut Pudja, eks Pelabuhan Buleleng. Workshop tersebut dibuka oleh

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradyana, menghadirkan seluruh Perbekel (Kepala Desa) beserta perangkat desa se-Buleleng. Materi disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari Dwikora Tono.

Di Buleleng terdapat 129 desa. Dari jumlah itu belum semua desa mengalokasikan dana kebencanaan, sesuai dengan Permendagri 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur disela-sela kegiatan Workshop mengakui, masih ada desa yang belum mengalokasikan dana kebencanaan. Dikatakan, itu terjadi akibat Permendagri 20, terbit setelah desa-desa menyusun rencana

kerja pemerintahan (RKP) Desa. "Karena Permendagrinya baru terbit, jadi nanti mulai tahun 2020, semua desa sudah mengalokasikan dana kebencanaan. Nanti kami buat Perbup-nya (Peraturan Bupati,Red)," katanya.

Subur juga menjelaskan, perubahan aplikasi Siskeudes dari versi 1.0 ke versi 2.0 juga sudah menambah satu bidang yakni bidang 5 (lima) keadaan mendesak seperti karena ada bencana. Pos anggaran ini bisa diambilkan dari pendapatan desa yakni dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau dari Bagi Hasil Pajak. "Masalah besaran alokasi anggarannya, tergantung kesepakatan di desa saat penyusunan RKP. Melihat juga

potensi kebencanaan di desa yang bersangkutan," jelasnya.

Menurut Subur, dengan adanya pos anggaran kebencanaan, Pemerintah Desa dapat mengeksekusi pembebanan pembiayaan dalam penanganan kebencanaan yang ada di desa. Selain itu Pemerintah Desa juga bisa memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada para korban bencana. "Dengan adanya Workshop Siskeudes ini, kami berharap semua aparat desa dapat mengelola keuangan desa yang sudah direncanakan dengan baik dan benar.

Sementara, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, mengatakan aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusya-

waratan Desa (BPD) di Kabupaten Buleleng agar mampu memahami aturan dan mekanisme dalam menyusun APBDes, dengan melihat karakteristik dari desa masing-masing.

Selain itu, baik Perbekel maupun BPD diharapkan mampu melihat keunggulan kooperatif dari seluruh komponen desa, baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun kemampuan masyarakatnya sendiri. "Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semua aparat desa bisa melakukan tanggungjawab yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa," katanya.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Ari

Dwikora Tono menjelaskan, implementasi siskeudes versi 2.0 ini merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dengan Kemendagri yang diberikan gratis kepada pemerintahan desa. Sehingga dapat berfungsi sebagai laporan yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Menurutnya, aplikasi ini dapat menjembatani tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia di desa dengan besarnya dana yang dikelola di desa. Dengan demikian sangat diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dimaksud. "Aplikasi versi 2 ini mudah sekali digunakan sehingga dapat digunakan oleh desa," jelasnya. k19

Edisi : Jumat, 29, Mar, 2019

Hal : 4



RADAR BALI

PEMKAB BADUNG

Giri Prasta Bagi Hibah Rp 1,15 M di Karangasem

AMLAPURA - Program Pemkab Badung, *Badung Angelus Buana* atau *Badung Berbagi dari Badung untuk Bali*, terus bergulir. Dan, Kamis kemarin (28/3), di jaba Pura Taman Gangsing, Karangasem, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta untuk kali kedua menyerahkan bantuan dana hibah di Karangasem.

Sebelumnya, Bupati mengunjungi dan memberikan bantuan hibah untuk Karya Melaspas Pura Dalem di Desa Pekraman Umacetra, Kecamatan Selat.

Kali ini, bantuan senilai Rp 1,150 miliar diserahkan secara simbolis kepada masyarakat di tiga desa adat di Kecamatan Sidemen.

Bantuan hibah ini, di antaranya; untuk membantu Karya

Mamungkah di Pura Dalem Lingsir, Banjar Toh Jiwa Kelod, sebesar Rp 300 juta, bantuan 1 set Gong Kebyar Pura Dalem Desa Adat Kubung, Sidemen, sebesar Rp 350 juta. Lantas, pembangunan Bale Agung Desa Pekraman Wangsean, Desa Wiswa Kerta, Sidemen, sebesar Rp 500 juta.

Bupati Giri Prasta mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banjar Kubung, karena sudah diberi kesempatan untuk hadir bersama masyarakat di Pura Taman Gangsing dalam upacara piodalan.

Bupati Giri Prasta mengatakan, sangat memahami bagaimana waktu banyak dihabiskan masyarakat untuk adat, uang habis untuk kegiatan *yadnya*. Makanya, Bupati hadir untuk meringankan beban

masyarakat, salah satu contoh; untuk membangun pura begitu juga bale banjar, wantilan.

Di Karangasem, dana hibah BKK Badung pertama, yang dituju Munti Gunung. Munti Gunung akan menerima bantuan bedah rumah sebanyak 215 KK dari 400 bedah rumah BKK Kabupaten Badung untuk Kabupaten Karangasem. Masing-masing mendapat dana Rp 50 juta. "Kami harapkan rumah ini dibangun dengan gotong-royong," harap Bupati Giri Prasta.

Manggala karya Jro Mangku Wika mengucapkan, *parama suksma* atas kehadiran Bupati Badung bersama rombongan. Pemberian bantuan hibah berlangsung di jaba Pura Taman Gangsing. (ad-vertorial/dwi/djo)



HUMAS PEMKAB KARANGASEM FOR RADAR BALI

BADUNG BERBAGI: Bupati Giri Prasta (kanan) serahkan hibah di jaba Pura Taman Gangsing, Karangasem.

Edisi : Jumat, 29, Mar, 2019

Hal : 3



RADAR BALI

Utang Badung Masih Rp300 M

Gara-gara Defisit Tahun 2018, Realisasi Anggaran Meleset

MANGUPURA - APBD Kabupaten Badung 2018 mengalami defisit mencapai Rp 700 miliar lebih. Defisit tersebut membuat Pemkab Badung menunggak pembayaran proyek. Meski demikian, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menjawab enteng terkait tunggakan tersebut.

"Saya tidak ikut masalah pembayaran (tunggakan pembayaran proyek), itu pengguna anggaran. Karena pengguna anggaran mempunyai kewenangan penuh. Bupati hanya penguasa anggaran. Penguasa anggaran adalah mengarahkan anggaran agar tidak melanggar hukum. Saya kira tidak ada masalah, buktinya proyek semua jalan, komunikasi bupati terhadap semua lini teta berjalan baik," jawab enteng Bupati Giri Prasta saat ditemui usai Pembukaan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Kamis (28/3).

Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa Pemkab Badung juga sudah melakukan pembayaran dan semuanya berproses. "Semua sudah berjalan dan sudah diterima. Kita juga sekarang mendapat deviden dari BPD sebesar Rp 200 miliar lebih," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Wayan Adi Arnawa mengaku sampai saat ini, utang Pemkab Badung kepada rekanan belum lunas. Dari tunggakan Rp700 miliar, sampai Maret ini baru terbayar

Rp400 miliar. "Sisanya lagi Rp 300 miliar lebih. Semoga di bulan Juni ini kita bisa melunasinya," tungkasnya

Ia mengatakan, pembayaran tunggakan kepada rekanan akan diutamakan atau diprioritaskan. Bahkan menurutnya, pembayaran tidak hanya pokok saja, Kabupaten Badung juga membayar bunga yang telah ditetapkan antara pihak ketiga. "Iya termasuk bunganya 1 persen juga kami bayar. Tapi ada juga yang tidak meminta bunga. Ini kan bagus dalam kondisi ini ada satu kepekaan oleh pihak rekanan," terang mantan Kadispemda (Bapenda sekarang) Badung ini.

Di sisi lain, rapat paripurna DPRD Badung tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 Kamis (28/3) kemarin menunjukkan pelaksanaan

APBD 2018 banyak meleset dari perencanaan. Dari target Rp7,569 triliun, hanya teralisasi Rp5,419 triliun alias hanya teralisasi 71,6 persen. Dari sisi belanja daerah juga tak tercapai. Dari target Rp8,155 triliun, realisasinya hanya Rp5,799 triliun (71,11 persen). Hanya penerimaan pembiayaan tahun 2018 yang realisasinya lebih tinggi dari target, yakni dirancang Rp 585,4 miliar, terealisasi Rp 600,9 miliar atau 102,66 persen. Sedangkan dari penarikan kembali pokok dana bergulir Rp 31,6 miliar. Dari pembiayaan tersebut, diperoleh sisa lebih pembiayaan tahunan berkenan sebesar Rp 221,3 miliar.

Meski demikian, Bupati Giri Prasta masih bisa berkelit terkait buruknya realisasi APBD 2018 ini. "Kita perlu pahami bersama APBD itu kan asumsi, belanja baru komitmen," kelit Giri Prasta usai rapat paripurna, kemarin.

Bupati Giri Prasta mencontohkan ketika ia sebagai Bupati dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu adalah roh uangnya Badung dari Pajak Hotel dan Restoran dan juga hiburan malam. "Misalkan, kalau sudah tahu *apple to apple* bahwa kita mendapatkan dana dari PHR itu katakanlah Rp 4,8 triliun, kalau saya pasang Rp 4 triliun berarti di tahun akan datang melebihi. Giri Prasta tidak begitu. Saya optimistis dua kali lipat waktu itu, tujuannya untuk kerja," jelasnya.

Kenaikan dua kali lipat potensi pajak dilakukan karena melihat potensi pajak *loss* (hilang) yang sudah diketahui agar dioptimalkan oleh pemungut pajak di Badung. "Sekarang juga kita merekrut tenaga ahli tentang perpajakan. Ke depan kita buat sistem sehingga tidak ada lagi double pembukuan di pemungutan pajak, termasuk piutang pajak dan lainnya," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Jumat, 29, Mar, 2019

Hal : 7



Pemkab Belum Bayar Iuran BPJS Rp 11,4 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem sejauh ini masih menanggung beban utang relatif besar. Sebab, kewajibannya membayar iuran layanan kesehatan kepada BPJS periode Februari-Maret belum dilakukan. Karena itu, mau tidak mau pemkab harus membayar iuran itu Rp 11.490.041.000. Terkait hal ini, BPJS dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi dengan pemkab, supaya pembayaran itu segera diusahakan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak mengungkapkan, untuk periode Januari, Pemkab Karangasem sudah membayarkan apa yang semestinya. Hanya, periode Februari-Maret, pemkab belum melakukan kewajibannya. "Pembayaran ini mencakup *sharing* dengan provinsi dan KKS pemerintah daerah," ucapnya.

Dari pengalaman sebelumnya, Kabupaten Karangasem selama ini, kata Simanjuntak, cukup komit membayar iuran itu. Malah Pemkab Karangasem paling cepat dalam proses pembayaran iuran itu. "Mungkin pembayaran itu

masih dalam proses. Karena pembayaran ini juga *sharing* dengan provinsi. Sebab, mengacu ketentuan paling lambat pembayaran iuran itu 10 Mei mendatang," katanya.

Atas keterlambatan itu, maka pihak BPJS segera melakukan koordinasi dengan Sekda Karangasem. Sehingga iuran ini bisa segera dibayarkan. "Kita berharap supaya pemkab segera bisa melaksanakan kewajibannya membayar iuran itu. Kita koordinasikan minggu ini," jelasnya sembari menegaskan keterlambatan ini tidak memengaruhi pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dikatakannya,

jika dibandingkan kabupaten lainnya, Karangasem paling tinggi dalam melayani kesehatan masyarakatnya karena mencapai 250 jiwa *sharing* dengan provinsi maupun KKS. Di samping itu, Karangasem juga sudah menjalankan *Universal Health Coverage* (UHC) bersama dua kabupaten lainnya yakni Klungkung dan Badung. Sementara untuk kabupaten lainnya masih dalam proses penerapan UHC ini.

"Kita juga apresiasi Karangasem. Sebab, saat ini, puskesmas yang ada di sini telah membuka layanan selama 24 jam. Jadi, warga yang sakit yang hendak me-

meriksakan keluarganya yang menderita sakit, maka bisa dilayani di puskesmas selama 24 jam," ujarnya.

Karena Karangasem sebelumnya senantiasa berusaha optimal, agar bisa memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakatnya. Semoga, harap Triana Simanjuntak, hal itu bisa diikuti puskesmas lainnya di luar Karangasem.
(kmb41)

Edisi : Sabtu, 30, Maret, 2019

Hal : 11



Desa Kukuh Terima Rp 1,5 M dari Pusat



PERBEKEL Kukuh Made Sugianto bersama Menteri Desa PD TT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo.

TABANAN, NusaBali

Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan, mendapat bantuan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PPIID-PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bantuan Rp 1,5 miliar diserahkan langsung Menteri Desa PD TT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo dalam acara Evaluasi Permendes PD TT Nomor 16 Tahun 2018 di Bali Dynasty Hotel, Kecamatan Kuta, Badung, Kamis (28/3) malam.

Bantuan serupa juga diberikan kepada dua desa di Buleleng dan satu desa di Kabupaten Karangasem.

Perbekel Desa Kukuh I Made Sugianto mengaku mensyukuri proposal yang diajukan ke Kemendes PD TT mendapat respon dan dibantu. Dana sebesar Rp 1,5 miliar ini akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kelompok tani beras sehat di Subak Jaka. Kelompok tani ini dibentuk pada tahun 2016. Awalnya hanya mengelola 10 hektare lahan

Dan Pemkab Tabanan melalui Gerbang Pangan Serasi (GPS) bantu 12 ekor sapi. "Tahun 2018 Pemkab Tabanan kembali bantu 23 ekor sapi. Ada juga sudah beranak tiga ekor sehingga jumlah sapi saat ini 46 ekor," ungkap Sugianto didampingi Pekaseh Jaka Ir I Wayan Yusa, kemarin.

Dijelaskan, jumlah kelompok tani juga sudah bertambah dari 70 orang kini 136 orang. Demikian juga luas lahan ra-

mah lingkungan jadi 23 hektare. "Kami sebut padi ramah lingkungan karena dikelola tanpa pupuk kimia. Kami pakai pupuk kandang bersumber dari kotoran sapi dan urine sapi piaraan petani," imbuh Sugianto.

Bertambahnya jumlah petani ramah lingkungan karena harga jual gabah menjanjikan yakni Rp 6.000/kg. Sementara gabah pertanian konvensional hanya Rp 4.000/kg. Gabah dengan harga Rp 6.000/kg dibeli oleh Perpadi. Meningkatkan minat petani lainnya di Kukuh untuk beralih ke pertanian ramah lingkungan, Perbekel Kukuh minta petunjuk Kepala Dinas PMD Tabanan untuk mencari bantuan ke Kemendes.

Proposal diajukan ke Kemendes pada tahun 2018. Tindak lanjutnya pengurus kelompok tani dan Ketua BUM-Des Kukuh Winangun dapat pelatihan di Jakarta. "Akhirnya bantuan Rp 1,5 miliar secara simbolis diserahkan oleh Bapak Menteri Eko Putro Sandjoyo tadi malam," terang Sugianto.

Dana PPIID-PEL akan digunakan untuk beli beras petani, beli bibit, pengolahan pupuk organik, mesin penggilingan gabah, perontok padi, timbangan, dan pick up. "Pengadaan barang sesuai proposal yang kami ajukan," jelas Sugianto. Diharapkan dengan dukungan pemerintah, semakin banyak yang melirik pertanian dan lahan sawah terselamatkan. Demikian juga ekosistem lingkungan makin bagus dengan tanpa penggunaan pestisida. **des**